

Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Mendukung Perekonomian Indonesia yang Tangguh

M. Suparmoko

Reformation and it's process shows us that Indonesia has lost it's direction in maintaining economical situation. Pancasila economic system, is still become our economic paradigm, referring to chapter 33 of amended constitution of 1945. Koperasi (corporation) as the pillar for Pancasila economic system, still unable to answer economic challenges for the future. The unclear direction of economic development, actually is caused by the ignorance of people toward ideas which is relevant to be grown in the context of Pancasila economic system. With only catching the surface of this economic system, impossible for Indonesian people to think deeply and maturely toward this economic system itself. Thus, this is the real question which must be addressed in the future coming.

Kata-kata kunci: *strategi ekonomi, pertanian, perhatian pemerintah*

Tidak diragukan kiranya bahwa sektor pertanian merupakan sektor utama yang memberikan kehidupan ke pada manusia dalam berbagai bentuk. Bentuk bahan pangan yang dibutuhkan antara lain seperti beras, kedelai, gula, ikan, daging, sayur mayur bahan mentah untuk sandang seperti serat kapas; dan bahan dasar untuk industri pengolahan seperti untuk kertas, pupuk kompos, obat-obatan dan kosmetika.

Lumpuhnya sektor pertanian

Data dan pengamatan langsung di lapangan menunjukkan bahwa sektor pertanian Indonesia tidak mampu untuk mendukung kehidupan bangsa Indonesia secara mandiri, hal ini ditunjukkan oleh impor produk pertanian Indonesia dari tahun ke tahun ada pada tingkat yang tinggi. Bahan konsumsi pokok dari produk pertanian untuk

memenuhi kehidupan sehari-hari seperti beras, gula, kedelai, daging dan buah-buahan masih selalu ditambah dengan iimpor dari negara lain baik dari negara-negara di Asia, Amerika Serikat, Australia maupun Eropa. Dengan kata lain kebutuhan akan bahan pokok produksi pertanian penduduk Indonesia tidak dapat dicukupi oleh produksi dalam negeri.

Sebagai contoh adalah beras. Untuk memenuhi kebutuhan pangan ini, beras selalu diimpor dalam jumlah besar seperti tampak pada Tabel 1.

Tampak pada tabel 1.1 bahwa impor selalu menunjukkan angka positif dan telah mencapai puncaknya (6.077.000 ton) pada tahun 1998 saat terjadi krisis ekonomi dan dimulainya liberalisasi perdagangan. Setelah itu impor beras tampak turun kembali, tetapi masih pada tingkat yang tinggi. Bahkan akhir-akhir ini selalu terdengar adanya penyelundupan beras dari luar negeri ke Indonesia dalam jumlah yang tidak sedikit

Tabel 1 Volume Impor Beras Indonesia 1995 – 2002

Tahun	Impor (000 ton)	
1995	3.104	
1996	1.090	
1997	406	
1998	6.077	
1999	4.183	
2000	1.512	
2001	1.404	
2002	3.703	
	<u>Rata-rata</u>	<u>% perubahan</u>
1995-1997	1.503	-
1998-2001	3.289	118,83
1999-2002	2.701	(-17,87)

Sumber: Badan Pusat Statistik, Jakarta

pula. Seperti tampak pada Tabel 1 juga bahwa rata-rata impor beras sebelum ada liberalisasi perdagangan (1995-1997) hanya setinggi 1.503.000 ton per tahun kemudian meningkat sebesar 118,83% menjadi rata-rata 3.289.000 ton per tahun setelah ada liberalisasi perdagangan 1998-2001. Tetapi kalau periode krisis tahun 1998 dikeluarkan, maka impor beras rata-rata telah menurun sebesar 17,87% menjadi 2.701.000 ton pada periode tahun 1999 -2002 dibanding dengan periode 1998-2001.

Keadaan tersebut sebenarnya sangat ironis mengingat negara Indonesia adalah negara yang dikarunia oleh sumberdaya lahan yang sangat luas serta memiliki jumlah pulau yang terbanyak di dunia yaitu lebih dari 17.500 pulau besar dan kecil. Dengan lahan yang luas seharusnya Indonesia mampu paling tidak mencukupi kebutuhan produk pertanian dari dalam

negeri sendiri. Bila dihitung dari data produksi per kapita dari tahun ke tahun sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 2001, produksi beras per kapita Indonesia telah mampu melebihi kebutuhan konsumsi 130 kg beras /kapita/tahun, sehingga seharusnya terjadi surplus seperti yang tampak pada Tabel 2 Indonesia tidak perlu mengimpor beras dari luar negeri. Apa yang salah dengan kasus produksi dan konsumsi beras per kapita tersebut?. Mungkinkah karena manajemen yang salah, sistem perdagangan yang tidak kondusif, sistem pengolahan pasca panen yang tidak efisien dan sebagainya. Hal ini perlu dikaji dan segera dicari pemecahannya serta segera dilaksanakan.

Tabel 2 Produksi dan Konsumsi Beras per Kapita Indonesia

Tahun	Produksi (kg/year)	Konsumsi (kg/year)	Surplus (kg/year)
1990	153,54	130,78	22,76
1991	148,77	130,94	17,83
1992	152,72	130,74	21,98
1993	154,93	130,64	24,29
1994	147,54	130,64	11,90
1995	154,83	130,48	24,35
1996	155,45	131,34	24,11
1997	154,95	131,56	23,39
1998	152,24	131,65	20,59
1999	151,98	131,44	20,54
2000	158,25	131,67	26,58
2001	152,52	131,00	21,52

Sumber: BPS

Keterkaitan antara Sektor Pertanian dan Sektor-Sektor Perekonomian lainnya

Sektor pertanian memiliki keterkaitan dengan sektor lainnya, seperti sektor industri, sektor jasa, sektor bangunan maupun sektor pertambangan dan sebagainya. Sektor pertanian merupakan pasar bagi sektor industri seperti produk tekstil, produk alat-alat pertanian, pupuk, pestisida, dan sebagainya; tetapi sebaliknya sektor industri, jasa, maupun pariwisata dan lain sebagainya merupakan pasar bagi produk pangan dan bahan mentah yang akan diolah lagi dari sektor pertanian. Oleh karena itu kemacetan di satu sektor akan memiliki dampak kemacetan pula di sektor lain dan demikian pula perkembangan di satu sektor akan mendorong perkembangan di sektor lainnya. Apa yang salah dengan pola pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Apakah pertumbuhan sektor pertanian yang lamban

sehingga mendorong timbulnya keterlambatan di sektor lainnya? Atau sebaliknya keterlambatan pertumbuhan di sektor luar pertanian menyebabkan sektor pertanian menjadi stagnan atau justru merosot perkembangannya; atau justru sektor lain berkembang pesat dan meninggalkan sektor pertanian tetapi ditopang dengan impor produk-produk pertanian dari luar negeri. Untuk melihat permasalahan ini, data pada Tabel 3 dan Tabel 4 mengenai persetujuan PMDN dan PMA di sektor pertanian pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 mungkin dapat membantu. Tampak dari kedua tabel tersebut bahwa investasi di bidang atau di sektor pertanian telah merosot tajam. PMDN yang disetujui telah menurun rata-rata 28,34 % per tahun dari Rp 16.071,4 milyar pada tahun 1996 menjadi Rp 2.408,2 milyar pada tahun 1999; dan untuk PMA di sektor pertanian telah menurun dengan rata-rata 22,57 % per tahun dari US\$ 1.521,60 juta pada tahun

Topik: In Memoriam Ace Partadiredja Kearah Pemikiran Ekonomi Kelembagaan

1996 menjadi US\$ 491.20 juta pada tahun 1999.

Jika di ditampilkan dalam grafik seperti tampak pada Gambar 1, maka garis persetujuan PMDN dan PMDN tampak turun secara drastis.

Dalam Rencana Pembangunan lima Tahun I sampai dengan ke III, pembangunan pertanian di Indonesia telah menjadi tulang punggung bagi pembangunan sektor industri pengolahan dan industri jasa. Dengan berhasilnya pembangunan pertanian waktu itu, produksi bahan pangan telah meningkat cepat bahkan Indonesia mencapai

swasembada pangan pada tahun 1984. Indonesia pernah menjadi negara murni eksportir beras (*net rice exporter*) sampai tahun 1994, tetapi setelah itu Indonesia mulai menjadi negara murni importir beras (*net rice importer*). Sektor pertanian yang telah berkembang menjadi produsen pangan bagi sektor-sektor di luar pertanian (sektor industri dan jasa), juga seharusnya sebagai sumber tenaga kerja karena banyak tenaga kerja yang dapat dibebaskan dari sektor pertanian sebagai akit peningkatan efisiensi produksi dan penghasilan di sektor pertanian, serta dapat pula sebagai sumber

Tabel 3 Persetujuan PMDN Sektor Pertanian di Indonesia: 1996 -30 Juni 2004 (Rp milyar)

Tahun	PERTANIAN						Perubahan (%)
	TPH	Peternakan	Perkebunan	Kehutanan	Perikanan	Total Pertanian	
1996	52,20	86,00	1.168,10	135,50	79,80	1.521,60	-
1997	234,40	1,80	200,40	0,00	27,10	463,70	- 69,53
1998	224,40	15,40	725,40	0,00	33,00	998,20	115,27
1999	80,60	48,30	283,80	8,80	69,70	491,20	- 50,79
2000*)	67,40	15,00	0,30	5,00	13,80	101,50	- 79,34*

Sumber: Menteri Negara/Kepala BPM dan Pembinaan BUMN (diolah)

Keterangan: *) Data sampai dengan bulan Juni 2000

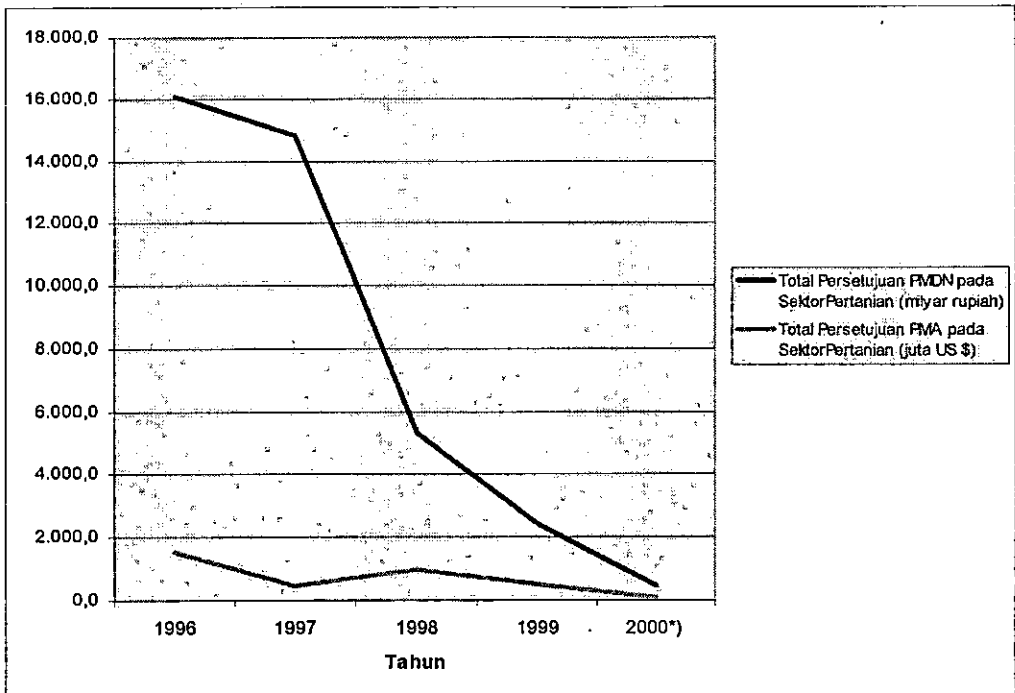
Tabel 4 Persetujuan PMA Sektor Pertanian di Indonesia: 1996 -30 Juni 2000 (Juta US\$)

Tahun	PERTANIAN						Perubahan (%)
	TPH	Peternakan	Perkebunan	Kehutanan	Perikanan	Total Pertanian	
1996	932,4	485,6	13.865,7	45,6	742,1	16.071,4	-
1997	308,2	154,6	13.274,7	165,5	904,7	14.807,7	- 7,86
1998	1.081,0	159,4	3.516,8	542,9	14,3	5.314,4	- 64,11
1999	335,6	1,1	1.278,0	749,3	44,2	2.408,2	- 54,68
2000*)	241,8	9,2	145,0	0,0	83,8	479,8	- 80,08*

Sumber: Menteri Negara/Kepala BPM dan Pembinaan BUMN (diolah)

Keterangan: *) Data sampai dengan bulan Juni 2000

Gambar 1 Grafik Persetujuan PMDN dan PMA Sektor Pertanian di Indonesia: 1996-30 Juni 2000



Sumber : Menteri Negara/Kepala BPM dan Pembinaan BUMN (diolah)

Keterangan : *) Data sampai dengan bulan Juni 2000

permodalan untuk sektor-sektor lainnya. Selama Repelita I sampai dengan Repelita III Pemerintah Indonesia telah menanamkan modal investasi untuk membangun fasilitas infrastruktur pertanian seperti bendungan dan saluran irigasi hampir di seluruh wilayah tanah air, khususnya di Pulau Jawa. Pembangunan prasarana waduk atau bendungan dan irigasi disertai dengan penggunaan bibit unggul telah mampu meningkatkan produksi pertanian berlipat ganda sehingga saat itu dinyatakan telah terjadi revolusi hijau di Indonesia seperti juga di negara-negara Asia lainnya. Sayangnya pada saat ini seluruh prasarana bendungan dan irigasi telah menurun kapasitasnya berhubung telah terjadi pendangkalan baik di waduk-waduk maupun di sungai dan di

saluran-saluran irigasi. Pendangkalan waduk, sungai dan saluran irigasi telah menyebabkan daya tampung air mereka merosot, karena pada musim hujan tingkat larian air sangat tinggi dan pada musim kemarau terdapat kekurangan air untuk memenuhi kebutuhan pertanian padi dan tanaman pertanian lainnya.

Sektor Pertanian Padi dan Multifungsinya

Sumbangan sektor pertanian padi pada PDB

Dalam tempo lebih dari 20 tahun (1975-2002) perekonomian Indonesia telah mengalami transformasi dari perekonomian

Topik: In Memoriam Ace Partadiredja Kearah Pemikiran Ekonomi Kelembagaan

agraris menjadi perekonomian industri. Pada tahun 1975 sektor pertanian menyumbang sekitar 30% kepada PDB dan proporsi ini hampir sama dengan sumbangan dari sektor lain, yaitu sektor industri 34% dari PDB dan sektor jasa 36% dari PDB. Dari waktu ke waktu peranan sektor pertanian telah bergeser dan pada tahun 1995 telah turun menjadi 17,1%, sedangkan sektor industri meningkat menjadi 41,8% dan sektor jasa menjadi 41,1%. Setelah krisis moneter dan krisis ekonomi melanda Indonesia, peranan sektor pertanian meningkat lagi menjadi 17,2% pada tahun 2000 dan 17,5% pada tahun 2002. Perhatikan Tabel 5.

Dari sudut pandang kemampuan sektor pertanian dalam menyerap tenaga kerja tercatat bahwa peranannya telah menurun dari 62% angkatan kerja Indonesia pada tahun 1975 menjadi 48% dari angkatan kerja pada tahun 1995, dan akhirnya konstan setelah krisis moneter dan ekonomi tahun 1998 menjadi sekitar 44% baik pada tahun 2000 maupun 2002. Perhatikan juga Tabel 5.

Dalam menilai sektor pertanian seringkali hanya dipusatkan pada kontribusi sektor pertanian terhadap produksi pangan

baik itu di sektor tanaman pangan, tanaman perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Sesungguhnya sektor pertanian tidak hanya memberikan manfaat atau pelayanan dalam produksi pangan dan barang-barang kayu hasil hutan dan hasil perkebunan, tetapi harus diperhatikan pula peranan sektor pertanian termasuk sektor kehutanan, perkebunan dan perikanan maupun peternakan terhadap jasa atau pelayanan lingkungan maupun pelayanan biologis yang ciptakannya.

Sebagai contoh, sektor pertanian padi tidak hanya memberikan produksi beras sebagai manfaat yang disumbangkan olehnya, tetapi sektor pertanian padi itu juga menghasilkan manfaat dalam bentuk kemampuannya memberikan jasa lingkungan (*environmental services*) seperti kemampuannya mengurangi erosi tanah, menahan banjir, menampung atau menahan air hujan, mencegah tanah longsor, menyerap karbon. Memang di sisi lain jika pertanian padi itu menggunakan pupuk kimia dan pestisida secara terus menerus, ia akan menyumbang terhadap penurunan kesuburan tanah dan kualitas lingkungan.

Tabel 5 Sumbangan Sektor Pertanian pada PDB dan Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia, 1975 -2002

Tahun	1975	1985	1995	2000	2002
Sumbangan Sektor pada PDB (%) :					
Pertanian	30.2	23.2	17.1	17.2	17.5
Industri	33.5	35.8	41.8	40.0	44.5
Jasa	36.3	40.9	41.1	42.8	38.1
Penyerapan Tenaga Kerja(%):					
Pertanian	62	56	48	44	44
Sektor Lainnya	38	44	52	56	56

Sumber: BPS

Sumbangan Sektor Pertanian Padi yang Terlupakan

Sumbangan sektor pertanian padi yang terlupakan adalah sumbangannya dalam bentuk pelayanan lingkungan dan pelayanan biologis (*Biological services*). Kemampuan sektor pertanian mengurangi erosi tanah, menahan bajir, menahan air hujan, mengurangi tanah longsor, menyerap karbon, maupun memberikan keanekaragaman hayati.

Bila semua nilai faktor negatif sebagai biaya sektor pertanian padi seperti penggunaan pupuk dan pestisida dikurangkan dari nilai faktor positif sebagai manfaat yang diciptakan oleh pertanian padi, maka akan tampak bahwa nilai ekonomi ladang sawah yang ditanami padi menjadi jauh lebih tinggi. Oleh karena itu bila terjadi konversi lahan, terutama menjadi lahan untuk penggunaan di sektor non-pertanian, maka pada saat transaksi penjualan, Pemerintah harus campur tangan dan menentukan harga jualnya termasuk pungutan atau pajak yang dikenakan ke padanya. Lahan sawah yang dikonversi menjadi lahan perkebunan dapat dikenakan harga sesuai dengan harga pasar yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran akan lahan tersebut. Tetapi kalau kemudian lahan tersebut dikonversi menjadi lokasi gedung perkantoran, atau lokasi pabrik, maka si pemrakarsa harus membayar kepada pemerintah sebesar nilai lingkungan dan nilai biologis yang hilang karena konversi lahan tersebut sebagai pembayaran pajak atas konversi lahan kepenggunaan yang menghilangkan atau mengurangi *environmental services* dan *biological services* pada tanah sawah. Hal seperti ini belum pernah dipikirkan di praktik jual beli lahan dan penggunaannya. Maka dari itu konversi lahan di Pulau Jawa dengan rata-rata 22,278 Ha/tahun antara 1990 –

2000 dan ini berlangsung terus tanpa dapat dibendung dengan laju setinggi 6% per tahun. Lihat data pada Tabel 6.

Tampak pada Tabel 6 bahwa Jawa Tengah memiliki laju konversi lahan tertinggi yaitu 10% per tahun, diikuti Jawa Barat 6,5% per tahun, Jawa Timur 5,9% per tahun dan Yogyakarta 4,3% per tahun, semuanya antara tahun 1990 – 2000.

Pada Tabel 7 menunjukkan jenis sektor penggunaan konversi lahan sawah di Jawa dan Indonesia secara keseluruhan. Dari data survei yang ada, di Indonesia, sebagian besar lahan sawah yang di konversi dialihkan ke penggunaan di luar sektor pertanian (74,33% di Jawa) dan (84,47% untuk Indonesia). Dari angka tersebut baik di Jawa maupun Indonesia tampak bahwa sektor perumahan menduduki proporsi tertinggi yaitu 32,84% di Jawa dan 54,40% di Indonesia. Kemudian penggunaan terbesar konversi lahan sawah adalah sektor industri untuk di Jawa 31,67%, kemudian diikuti oleh sektor jalan 5,55%, dan lainnya 3,59%. Untuk Indonesia secara keseluruhan justru sektor lain-lain menggunakan proporsi tertinggi setelah sektor perumahan yaitu 25,16% untuk sektor lain-lain, kemudian diikuti sektor industri 15,46% dan jalan 4,90%. Selanjutnya penggunaan lahan konversi sawah kepenggunaan di sektor pertanian non-padi lebih tinggi proporsinya di Jawa 25,67% di banding dengan proporsinya untuk Indonesia secara keseluruhan yaitu hanya 15,53%. Hal yang terakhir ini menunjukkan bahwa lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian dan perkebunan masih tersedia lebih luas di luar Jawa dibandingkan dengan di Pulau Jawa.

Tabel 6 Laju konversi lahan di Pulau Jawa dan di Indonesia, 1990 – 2000

Propinsi	Rata-rata (Ha/tahun)	Rata-rata Konversi per tahun (%)
Jawa Barat*) (1997 -2000)	7.406	6,65
Jawa Tengah (1987-2000)	6.721	10,80
DI Yogyakarta (1990-2000)	224	4,30
Jawa Timur (1993-2000)	8.285	5,90
Total	22.278	6,91

Catatan: *) Masih termasuk Propinsi Banten

Sumber: Perkiraan atas data yang dikumpulkan Sumaryanto untuk tahun 1987 – 1993 dibandingkan dengan luas lahan yang ada pada tahun 2000, di mana tercatat rata-rata konversi lahan di Jawa antara tahun 1987 sampai dengan 1993 mencapai 22.276 Ha per tahun, di mana konversi lahan yang tertinggi ada di Jawa Timur seluas 57.996 Ha antara 1987 -1993, diikuti oleh Jawa Tengah seluas 40,327 Ha antara 1981 – 1986, Jawa Barat seluas 37,033 antara 1987 -1991 dan DI Yogyakarta seluas 2,910 selama 1986 – 1993. Lihat Sumaryanto dkk. (2001).

Penilaian yang terlalu rendah pada lahan pertanian

Tidak adanya insentif harga

Hal ini perlu disimak kembali apa pendapat yang dikemukakan oleh Prof. A.T. Mosher dan diajarkan oleh guru saya Prof. Mubyarto, bahwa insentif harga sangat diperlukan untuk pembangunan pertanian* / . Bagaimanapun juga produk pertanian itu akan mempunyai nilai tukar (*terms of trade*) yang rendah karena sifatnya sendiri yang *bulky*, relatif kotor, dan perlu banyak tenaga dalam memanfaatkannya, serta tersedia dalam jumlah yang relatif banyak sehingga membuat harganya relatif rendah bila dibanding dengan produk industri manufaktur. Dengan harga yang rendah tidak ada insentif bagi para petani untuk terus bekerja di sektor pertanian. Kalau hanya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran, maka jelas harga produk pertanian tidak akan mampu memberikan insentif produksi. Karena itu menjadi kewajiban Pemerintah untuk memberikan dorongan kepada para petani untuk tetap mau beraktifitas di bidang pertanian.

Lemahnya sektor pertanian akan membuat perekonomian suatu negaramenjadi rawan. Sekarang ini ada dua komoditi strategis dalam perdagangan internasional; yaitu modal dan pangan. Modal dan pangan ada di tangan negara-negara maju, sehingga negara maju dapat berbuat semaunya demi kepentingan mereka sendiri dan sangat mampu mempengaruhi kebijakan negara-negara sedang berkembang.

Sebagai contoh penilaian ekonomi terhadap lahan sawah telah dibuat oleh Bambang Irawan, dkk. dan juga oleh Lahmuddin Agus,. dkk. Hasil karya mereka dikembangkan dan diperoleh nilai setinggi US\$ 3.926,63 per hektar sawah. Perhatikan Tabel 3.1

Konversi lahan terlalu undervalued

Salah satu reaksi para petani terhadap rendahnya penghasilan di sektor pertanian adalah banyaknya lahan sawah yang dikonversi menjadi lahan non-pertanian sebagai akibat dua kekuatan yaitu program pembangunan pemerintah yang memerlukan lahan untuk pengembangan infrastruktur, bangunan kantor, sekolah serta

Tabel 7 Sektor pengguna konversi lahan sawah di Pulau Jawa dan di Indonesia, 1970 – 2001

Sektor	Jawa Barat	Jawa Timur	Rata-rata	
			Jawa	Indonesia
<u>Non-pertanian:</u>				
Perumahan	38,57	27,12	32,84	54,40
Industri	30,15	31,82	31,67	15,46
Jalan	2,74	8,36	5,55	4,90
Lainnya	2,15	7,77	3,59	25,16
Jumlah	73,65	74,07	74,33	84,47
<u>Pertanian non-padi</u>	26,35	24,93	25,67	15,53
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Untuk Jawa, lihat Sumaryanto, et.al. , 1995; Untuk Indonesia, lihat Kementerian Lingkungan Hidup, 1999.

bangunan pabrik maupun permukiman penduduk. Dengan rendahnya harga produk pertanian maka hal ini mempercepat gerakan konversi lahan pertanian dan petani beralih profesi ke sektor non-pertanian. Sektor pertanian akhirnya mengalami kekuranganlahan dan sekaligus juga kekurangan tenaga kerja karena tinggal para petani yang berumur di atas 35 tahun yang mau tinggal di sana. Golongan pekerja umur muda (<35 tahun) lebih senang bekerja di kota, sebagai sopir ataupun tukang ojek dan sektor bangunan. Masa depan pertanian Indonesia akan redup dan mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa datang.

Akibat dari rendahnya harga padi telah mempercepat konversi lahan dan harga jual lahan sawah terlalu rendah karena tidak memperhitungkan nilai sosial dan nilai lingkungan yang terkandung di dalamnya, jadi jika terjadi konversi lahan sawah menjadi non-sawah seperti untuk perkantoran, pabrik, real estate dan sebagainya, nilai lingkungan yang hilang telah diperkirakan setinggi US\$ 2.101;12 /Ha/tahun. Nilai ini seharusnya dibebankan oleh pemerintah

dalam bentuk pajak kepada pengembang atau pemilik pabrik jika mereka mengubah lahan sawah menjadi real estate atau pabrik. Jadi selama ini harga jual sawah yang dikonversi menjadi lahan non sawah telah dinilai terlalu rendah karena tidak memperhitungkan nilai lingkungan yang hilang.

Pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Tidak ada perhitungan deplisi sumberdaya alam

Kondisi yang dimiliki sekarang ini tidak kondusif untuk pembangunan berkelanjutan. Pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi berkelanjutan (*sustainable development*) tidak mungkin bisa dilaksanakan kalau keberlanjutan tersedianya sumberdaya alam dan lingkungan tidak dapat dipertahankan. Lingkungan memiliki tiga fungsi utama. Salah satunya adalah penyediaan sumberdaya alam seperti lahan tanah dan air serta udara yang tidak tercemar.

Fungsi lingkungan yang lain adalah pelayan langsung yang berupa air bersih, pemandangan yang indah dan sebagainya; dan fungsi lingkungan dalam mengolah limbah secara alami. Semua fungsi lingkungan tersebut telah merosot dari tahun ke tahun sehingga cadangan sumberdaya alam menurun dan degradasi lingkungan meningkat. Menurunnya cadangan sumberdaya alam dan degradasi lingkungan

ada dorongan eksploitatif yang lebih intensif lagi. Dalam jangka panjang pembangunan yang ditampilkan atas dasar nilai PDRB yang konvensional atau yang masih Coklat itu jelas akan mengalami stagnasi seperti yang kita alami sekarang ini.

Sumberdaya alam dinilai terlalu rendah

Sebagai akibat dari tidak adanya valuasi ekonomi yang tepat, sumberdaya

Tabel 8 Nilai Biaya dan Manfaat Lahan Sawah di Jawa, 2004 (US\$/Ha/Tahun)

No.	Manfaat dan Biaya	Rata-rata Nilai (US\$/Ha)	(%)
1	Biaya kesehatan karena penggunaan pestisida	0,04	-
2	Hilangnya pendapatan karena sakit	0,97	-
3	Total biaya	1.01	-
4	Nilai ekonomi ^{*)}	1.430,09	36,4
5	Nilai sosial	396,43	10,1
6	Nilai lingkungan (menahan erosi, banjir, penampung air, dsb)	2.101,12	53,5
7	Total manfaat	3.927.64	-
8	Total manfaat neto	3.926,63	100

Sumber: M. Suparmoko, dkk. (2004)

Catatan : *) Nilai ekonomi neto = nilai produksi – semua biaya produksi

tersebut tidak pernah dicerminkan secara eksplisit dalam berbagai perhitungan seperti dalam nilai sumbangan sektor pertanian terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Nilai penyusutan atau depresiasi yang ditampilkan hanya depresiasi sumberdaya kapital buatan manusia (*man-made capital*) dan tidak ada penampilan depresiasi modal ciptaan Tuhan (*natural atau God made capital*). Akibatnya nilai PDRB atau pendapatan yang ditampilkan disetiap propinsi maupun kabupaten atau kota di Indonesia menjadi terlalu tinggi daripada yang sebenarnya, sehingga akan

alam dinilai terlalu rendah, sehingga tercermin pula pada nilai produk yang dihasilkan di sektor pertanian. Nilai yang rendah terhadap sumberdaya alam seperti air misalnya akan mendorong timbulnya pemborosan pemakaian air. Di sisi lain tersedianya sumberdaya air yang memadai semakin menipis. Akibatnya akan terjadi krisis air. BAPPENAS telah memperkirakan dalam 25 tahun mendatang Indonesia akan mengalami krisis air dan Departemen KIMPRASWII memperkirakan ketersediaan air bersih untuk Pulau Jawa hanya akan

bertahan sampai 6 tahun lagi sejak sekarang jika tidak ada perubahan manajemen sumberdaya air dan hutan. Sudah merupakan hukum ekonomi, bahwa apabila harga murah akan terjadi banyak permintaan atau penggunaan, sedangkan apabila harga tinggi akan terjadi penggunaan yang hemat dan permintaan yang rendah. Namun untuk sumberdaya air perlu adanya cadangan yang melimpah karena air merupakan kebutuhan utama untuk semua sektor kegiatan ekonomi maupun kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Strategi Pembangunan Pertanian yang Berkelanjutan

Banyak kelemahan yang dihadapi sektor pertanian Indonesia dan masalahnya sudah terlalu kompleks dan saling berkaitan satu sama lain. Yang jelas peranan sektor pertanian dalam mendukung kehidupan bangsa Indonesia sangat besar baik dalam menyediakan lapangan kerja, maupun dalam menciptakan pendapatan secara langsung maupun tidak langsung melalui *backward* dan *forward linkages* -nya yang cukup panjang. Namun sektor pertanian saat ini sedang terancam untuk tersisih karena banyak masuknya produk pertanian impor sebagai dampak dari liberalisasi perdagangan internasional. Organisasi semacam WTO selalu mendesak negara-negara anggotanya untuk menekan tarif (*pungutan impor*) serendah mungkin dan menggantikan sistem kuota impor dengan sistem tarif. Karena teknologi yang dimiliki oleh Indonesia dan sistem perekonomian yang tidak menguntungkan, maka Indonesia berada pada posisi yang lemah; sedangkan Republik Rakyat Cina misalnya sangat diuntungkan oleh adanya peraturan WTO. Dengan dihapuskannya kuota tekstil misalnya, Cina justru dapat mengisi pasar

internasionalnya karena produk tekstil yang dihasilkannya tinggi kualitasnya dan murah harganya. Sebaliknya produk Indonesia justru mahal harganya. Hal ini sudah diketahui sejak dulu karena adanya biaya produksi tinggi karena memang negeri ini selalu mengalami *high cost economy* sebagai akibat banyaknya biaya siluman, peraturan yang tidak jelas dan tidak konsisten, peraturan yang mudah berubah dan berganti, serta kebijakan yang tidak jelas dalam jangka panjang. Dengan demikian maka Indonesia sebenarnya sangat lemah dari sisi manajemen dan sedang belajar menata bagaimana sebaiknya mengelola negara ini baik dilihat dari sistem politiknya, sistem ekonominya, maupun sistem sosialnya. Perlu disusun lagi rencana pembangunan jangka panjang (25 tahun) yang dirinci lagi dalam Repelita seperti dalam masa Orde Baru dulu.

Untuk melakukan pembangunan berkelanjutan diperlukan beberapa syarat, yaitu:

Tingkatkan kondisi keamanan dan stabilitas politik, ekonomi, dan sosial

Seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah ORDE Baru dulu, bahwa pembangunan harus berpedoman pada Tri Logi Pembangunan: stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Hendaknya urutan tri logi pembangunan tersebut adalah stabilitas, pemerataan, dan pertumbuhan ekonomi. Stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebenarnya merupakan prasyarat bagi stabilitas sosial; dan ini merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesempatan maupun pemerataan hasil-hasil pembangunan. Oleh karenanya jika diinginkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan maka Pemerintah terpilih sekarang ini harus

berusaha keras menjamin stabilitas politik, ekonomi dan sosial sebagai landasan pembangunan berkelanjutan.

Perbaiki sistem perijinan untuk investasi di sektor pertanian

Sistem perijinan yang selama ini terkesan sangat lamban dalam penyelesaiannya perlu dipersingkat. Persyaratan-persyaratan perijinan yang tidak penting harus dihilangkan. Pemerintah harus menciptakan suasana yang kondusif untuk investasi misalnya dengan memberikan Hak Guna Usaha yang cukup lama (lebih dari 30 tahun) atas suatu areal tanah pertanian yang diusahakan baik oleh investor asing maupun oleh investor domestik. Semua perijinan harus disertai studi AMDAL yang benar untuk menjaga kerusakan dan degradasi sumberdaya alam dan lingkungan sebagai basis pembangunan pertanian khususnya dan pembangunan ekonomi pada umumnya.

Penelitian dan pengembangan harus difasilitasi

Penelitian dan pengembangan harus difasilitasi dalam arti bahwa disediakan anggaran yang cukup, sehingga para peneliti dapat secara serius melakukan penelitian untuk menemukan inovasi baru di bidangnya masing-masing. Sistem *reward and punishment* perlu diterapkan dan ditegakkan. Siapa yang sukses dan berhasil sebagai inovator harus diberi penghargaan yang tinggi, dan siapa yang tidak berprestasi harus dipacu sedemikian rupa untuk mampu mengubah sikap dan kemampuannya. Tanpa penelitian yang berhasil, perkembangan sektor pertanian akan sangat lamban juga. Bandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian Thailand dan Vietnam misalnya. Produk-produk pertanian Thailand dan Viet-

nam seperti beras dan buah-buahan banyak masuk ke Indonesia dan tidak sebaliknya.

Penggunaan pupuk organik dan IPM ditingkatkan

Untuk memperbaiki kualitas lingkungan hidup yang sudah merupakan kebutuhan dari masyarakat pada umumnya perlu digunakan pupuk organik karena selama ini telah terbukti penggunaan pupuk anorganik telah menyebabkan kualitas tanah menurun. Tanah yang dipupuk dengan pupuk kimia itu menjadi semakin kenyal dan sulit menyerap unsur hara NPK, akibatnya volume pupuk yang digunakan harus ditambah terus sementara tingkat produksi tetap karena sudah jenuh dan pada tingkat yang sudah tinggi pula. Di samping itu kualitas lingkungan yang baik karena tidak menggunakan pupuk kimia maupun obat-obatan (pestisida) akan memberikan kesehatan yang baik pula pada para petani yang terlibat langsung pada kegiatan pertanian, maupun ke pada para konsumen hasil pertanian serta masyarakat lainnya. Lingkungan perlu dijaga kelestariannya karena lingkungan harus selalu mampu menyediakan produk-produk alami (sumberdaya alam), menampung dan mengolah limbah, serta memberikan pelayanan dan kesenangan langsung kepada seluruh warga masyarakat.

Perbaiki kualitas hutan dan penghijauan di bagian hulu DPS

Salah satu sebab dari hancurnya produk pertanian Indonesia adalah karena tidak terpeliharanya sumberdaya hutan dan penghijauan di bagian hulu Daerah Pengaliran Sungai. Dampak dari kerusakan hutan dan penghijauan di daerah hulu itu telah menyebabkan adanya tingkat erosi tanah yang tinggi, sehingga produktivitas

pertanian menurun karena hilangnya lapisan tanah atas (*top soil*) yang berarti kesuburan tanah berkurang, dan juga erosi itu telah menyebabkan pendangkalan sungai maupun pendangkalan pantai. Volume air yang dapat ditampung oleh saluran/sungai sangat menurun drastis sehingga fluktuasi debit air sangat tinggi yang menunjukkan bahwa tingkat larian air hujan sangat tinggi pula. Pada musim hujan terjadi banjir dan pada musim kemarau terjadi kekeringan yang amat sangat. Produksi pertanian akan merosot baik karena banjir dan juga karena kekeringan. Hasil penelitian di desa Pucangan, Kebumen dan di desa Gegesik Wetan, Cirebon menunjukkan bahwa banyak saluran irigasi teknis yang tidak mampu mengalirkan air irigasi sama sekali. Jadi hanya namanya irigasi teknis, tetapi dalam kenyataannya tidak ada air lagi, (Lihat Tabel 9). Tampak pada tabel 9 bahwa sebagian besar sawah di 4 desa sampel beririgasi semi teknis 61%, teknis 1%, dan tadah hujan 38%. Semua sawah tersebut mengalami kesulitan air pada musim kemarau.

Perbaiki infrastruktur fisik pertanian, termasuk teknologi pasca panen, dan pemasaran

Infrastruktur fisik pertanian mengalami penurunan dahsyat dalam 15 tahun terakhir ini; terbukti dari penurunan kapasitas waduk di banyak tempat, terjadi pendangkalan sungai dan menurunnya kapasitas saluran irigasi. Hal ini sesuai dengan penemuan bahwa sistem pengairan teknis maupun non teknis telah menurun kemampuan kerjanya seperti tertera pada Tabel 9 di atas. Banyak diperlukan usaha dan biaya untuk mengeruk sedimen yang diendapkan di banyak dasar sungai, dan selanjutnya merehabilitasi hutan dan hijauan di bagian hulu Daerah Pengaliran Sungai.

Di samping itu perlu juga perbaikan infrastruktur pasca panen dan pemasaran produk-produk pertanian. Petani perlu diberikan insentif ekonomi agar tetap bersedia mempertahankan kegiatan produksi pertaniannya. Dengan banjirir produk pertanian ke dalam negeri Indonesia, harga produk pertanian terutama beras mengalami stagnasi dibanding dengan harga barang lain. Harga riel beras mengalami penurunan yang berkelanjutan sejak adanya liberalisasi perdagangan internasional pada tahun 1998 di mana waktu itu beras diimpor mencapai 6 juta ton pertahun. (Lihat Tabel 10) Dalam harga nominal tampak bahwa harga beras cenderung naik terus.

Sejak 1992 sampai dengan 2003, walaupun sejak 1999 harga beras tersebut berfluktuasi sampai dengan tahun 2003. Namun apabila harga beras itu dinyatakan pada harga riel dengan menggunakan angka inflasi yaitu indeks harga konsumen (IHK) sebagai alat deflator, maka harga riel beras tampak turun terus yaitu dari Rp. 1.315,49/kg pada tahun 1999 menjadi Rp. 996,41/kg pada tahun 2003, suatu penurunan rata-rata 7% per tahun antara 1999 sampai dengan 2003. Agar memperjelas kecenderungan harga nominal dan harga riel beras, data pada Tabel 10 divisualisasikan dengan grafik pada Gambar 2. Tampak pada Gambar 2 tersebut bahwa harga nominal beras atau harga yang berlaku menanjak dengan cepat, tetapi harga riel beras juga naik terus sampai tahun 1999, kemudian merosot terus setelah itu.

Perbaiki kinerja pegawai negeri sipil di bidang pertanian

Kinerja PNS maupun para penyuluh dan para PNS peneliti pertanian harus ditingkatkan, karena mereka inilah yang merupakan motor penggerak perkembangan

Tabel 9 Kondisi Pengairan di 4 desa yang diteliti di Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cirebon, 2003

Desa	Sistem Pengairan			
	Teknis	Semi Teknis	Tadah hujan	Total
<u>Kebumen:</u>				
Pucangan	2	9	57	68
Kebagoran	-	24	18	42
<u>Cirebon:</u>				
Gegesik- Wetan	-	86	15	101
Panggangsari	2	39	11	50
Total	4 (1%)	158 (61%)	101 (38%)	261 (100%)

Sumber: : M. Suparmoko, dkk, *The Impacts of Agreement on Agriculture on Economic, Social and Environment in Indonesia: The rice Sector Case*, UNEP/UNSOED, Geneva, 2004

sektor pertanian. Tanpa SDM yang baik, kinerja sektor pertanian akan terhambat. Untuk meningkatkan kinerja baik para peneliti maupun para penyuluh pertanian, sistem *reward and punishment* harus diaktifkan. Siapa yang berjasa harus diberi penghargaan dan siapa yang tidak beprestasi sebaiknya disingkirkan. Pegawai negeri harus diberi gaji yang tinggi agar serius dalam melakukan pekerjaan mereka dan tidak perlu melakukan terlalu banyak kegiatan. Hal ini akan meningkatkan keahlian dan sekaligus memberikan ketenangan kerja. Mekanisme pasar akan dapat berjalan baik dan dapat dicapai efisiensi yang tinggi pula. Namun untuk mendukung itu diperlukan penegakan hukum yang handal, sehingga para penegak hukum juga harus digaji dengan jumlah yang tinggi pula. Sistem penggajian dalam sistem keuangan Indonesia harus direformasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pembangunan, meningkatkan pemasukan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah serta mengendalikan pengeluaran negara pada tingkat yang layak.

Berikan penilaian ekonomi yang benar pada produk dan sumberdaya alam pertanian

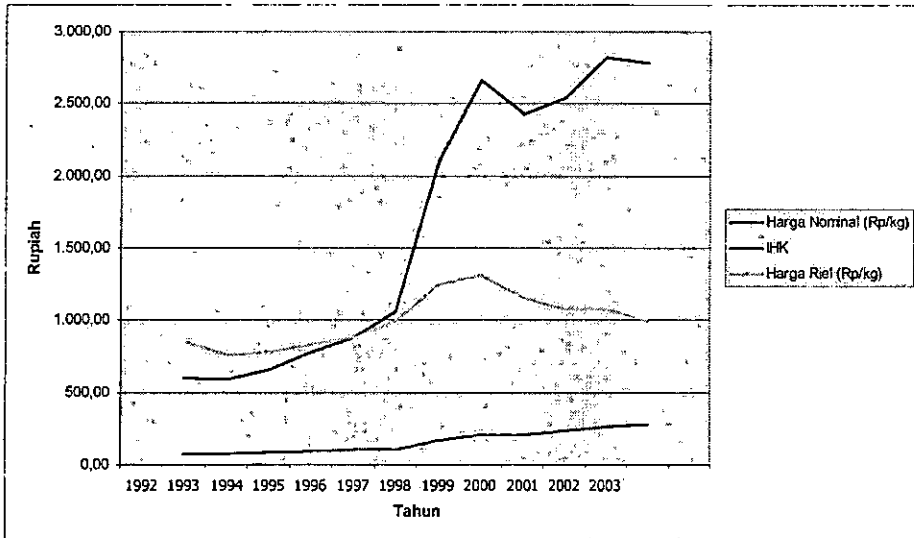
Akhirnya perhatian perlu diberikan pada sistem penilaian ekonomi (*economic valuation*) yang benar terhadap sumberdaya alam dan lingkungan yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Seringkali sumberdaya lahan dinilai terlalu murah, sehingga mudah sekali dikonversikan menjadi lokasi kegiatan non-pertanian. Ini adalah tugas pemerintah untuk mengenali nilai ekonomi yang sebenarnya dari sektor pertanian. Konversi lahan pertanian ke non-pertanian tidak hanya mengurangi produksi pertanian saja, tetapi juga hilangnya nilai-nilai jasa lingkungan yang dapat disediakan oleh sektor pertanian maupun jasa keanekaragaman hayati serta jasa biologis lainnya turut hilang. Hanya pemerintahlah yang dapat memperhatikan dan mempertahankannya, sehingga valuasi ekonomi terhadap sumber-sumber pertanian sangatlah penting. Berapa pula nilai penurunan kualitas lahan karena adanya pencemaran sektor industri misalnya juga perlu dihitung untuk menentukan berapa

Tabel 10 Harga Nominal, Indeks Harga Konsumen dan Harga Riel Beras: Pasar Induk Cipinang, Jakarta, 1995 – 2003

Tahun	Harga Berlaku (Rp/kg)	IHK	Harga Riel (Rp/kg)
1992	603,68	71,11	848,94
1993	592,25	77,96	759,68
1994	660,37	84,63	780,30
1995	776,38	92,59	838,51
1996	880,00	100,00	880,00
1997	1.063,80	106,67	997,28
1998	2.099,03	168,32	1.247,05
1999	2.665,58	202,63	1.315,49
2000	2.424,22	210,27	1.152,91
2001	2.537,09	234,46	1.082,10
2002	2.826,06	262,31	1.077,37
2003	2.785,85	279,59	996,41

Sumber: M. Suparmoko, dkk, *The Impacts of Agreement on Agriculture on Economic, Social and Environment in Indonesia: The rice Sector Case*, UNEP/UNSOED, Geneva, 2004

Gambar 5.1 Harga Nominal, Indeks Harga Konsumen dan Harga Riel Beras: Pasar Induk Cipinang, Jakarta, 1995 – 2003



Sumber: M. Suparmoko, dkk, *The Impacts of Agreement on Agriculture on Economic, Social and Environment in Indonesia: The rice Sector Case*, UNEP/UNSOED, Geneva, 2004

pungutan yang harus dibayar oleh sektor industri (para pengusaha industri) terhadap penurunan kualitas sumberdaya pertanian seperti air dan tanah yang tercemar limbah industri. Selama ini belum ada perhatian ke arah itu. Kalau air sungai tercemar olah limbah industri tidak hanya pertanian saja yang terkena akibatnya, tetapi juga sektor peternakan dan sektor perikanan akan terkena dampak secara langsung dan produktivitas maupun kualitasnya akan menurun.

Penutup

Pembangun pertanian harus dikuatkan kembali, karena tanpa pertanian yang tangguh perekonomian Indonesia akan tidak mampu berkembang melayani kebutuhan penduduk maupun industrinya. Masuknya produksi pertanian impor akan melemahkan kemampuan produksi pertanian di dalam negeri dan akan mempengaruhi tingkat pengangguran dan taraf hidup sebagian besar rakyat Indonesia.

Harus diusahakan lagi sistem perencanaan pembangunan lima tahunan untuk jangka waktu 25 tahun agar pembangunan pertanian menjadi terarah dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang tangguh.

Penelitian dan pengembangan pertanian harus ditingkatkan kembali dengan menerapkan sistem reward and punishment. Sistem penggajian pegawai negeri harus diperbaiki serta perlu perombakan dalam sistem keuangan negara Indonesia untuk masa mendatang.

Penghitungan valuasi ekonomi perlu ditingkatkan untuk sektor pertanian sehingga nilai ekonomi sektor pertanian akan diketahui secara benar. Oleh karenanya Pemerintah harus ambil bagian dalam mempertahankan sektor pertanian karena

nilai lingkungan, biologis dan keanekaragaman hayati hanya pemerintah yang mampu memberikan perhatian dan menjaganya.

Daftar Pustaka

- Anonymous, 2000, *Reference Manual for the Integrated Assessment of Trade-Related Policies*, UNEP, New York and Geneva: United Nations.
- Anonymous, 1997, *Natural Resource Statistics of Indonesia 1996*. Jakarta: Biro Pusat Statistik.
- Anonymous, 2002, *Statistical Yearbook of Indonesia 2001*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Anonymous, 2001, *Environmental Statistics of Indonesia 2000*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Anonymous, 2001, *Agricultural Indicators 2000*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Anonymous, 2001, *Agricultural Survey: Land Area by Utilization in Indonesia 2000*, Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Achmad Suryana & Sudi Mardianto, 2001, *Bunga Rampai Ekonomi Beras*, Jakarta: LPEM-FEUI.
- Anonymous, 1996, *Environment, Sustainability and Trade Linkages for Basic Foodstuffs*, Food and Agriculture Organization of the United Nations Rome.
- A .T. Mosher, 1966, *Getting Agriculture Moving*, New York: Frederick A Praeger, Publisher.

- Husein Sawit, "Arah Kebijakan Distribusi/Perdagangan Beras dalam Mendukung Ketahanan Pangan: Perdagangan Dalam Negeri" (The Direction of Rice Distribution/Trade to Support Food Security : Domestic Trade), in Rudi Wibowo, Editor, 2000 *Pertanian dan Pangan (Agriculture and Foods)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M. Suparmoko, dkk, 2004. *The Impacts of Agreement on Agriculture on Economic, Social and Environment in Indonesia: The rice Sector Case*, UNEP/UNSOED, Geneva.
- M. Suparmoko, 2000, *Ekonomika Lingkungan*, Edisi Pertama, Yogyakarta: BPFE.
- Rudi Wibowo, "Penyediaan Pangan dan Permasalahannya" (Food Reserve and Its Problems), in Rudi Wibowo, 2000. Editor, *Pertanian dan Pangan (Agriculture and Foods)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sumaryanto, Supeno Priyatno, and Bambang Irawan, "Konversi Lahan Sawah ke Penggunaan Non-Pertanian dan Dampak Negatifnya" (Paddy Field Conversion to Non-Agriculture Use and Its Negative Impacts), in F. Agus, U. Kurnia and A.R. Nurmanaf, Editors, *Proceeding of Seminar Nasional Multifungsi Lahan Sawah, (Proceeding of National Seminar on Multifunctional of PaddyField)* Bogor, 2001.
- Tabor, S., M.Husein Sawit, dan HS Dillon, 2002. "Indonesian Rice Policy and the Choice of a Trade Regime for Rice in Indonesia", paper prepared for a Roundtable Workshop, at LPEM UI.

